

**DARI NORMALISASI HINGGA SANKSI POLITIK: MAKNA
POLITIK UANG BAGI PEMILIH BURUH DI PEMILU
LEGISLATIF TINGKAT LOKAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang

Ilmu Politik



Muhammad Arif Adhimuddin

NIM I91219090

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maret, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Arif Adhimuddin
NIM : I91219090
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Dari Normalisasi hingga Sanksi Politik: Makna Politik
Uang bagi Pemilih Buruh di Pemilu Legislatif Tingkat
Lokal

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Sidoarjo, 17 Februari 2024

Yang menyatakan



Muhammad Arif Adhimuddin

NIM I91219090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan terhadap skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Arif Adhimuddin

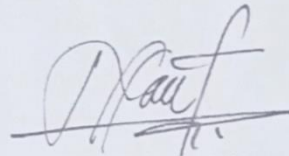
NIM : I91219090

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **Normalisasi Politik Uang: Implikasi terhadap
Perspektif Pemilih Buruh (Studi Pemilihan Umum
Legislatif Tahun 2024 di Desa Keboharan, Kabupaten
Sidoarjo)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk disidangkan.

Surabaya, 6 Maret 2024
Pembimbing



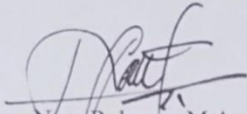
Noor Rohman, MA.
NIP. 1985101192015031001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

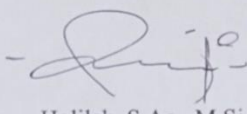
Skripsi oleh Muhammad Arif Adhimuddin dengan judul *Dari Normalisasi hingga Sanksi Politik: Makna Politik Uang bagi Pemilih Buruh di Pemilu Legislatif Tingkat Lokal* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 13 Maret 2024.

Tim Penguji Skripsi

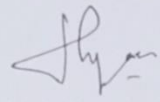
Penguji I


Noor Rohman, M.A.
NIP. 1985101192015031001

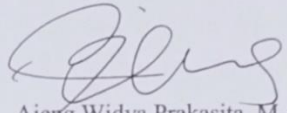
Penguji II


Holilah, S.Ag., M.Si.
NIP. 197610182008012008

Penguji III


Dr. Moh. Ilyas Rolis, M.Si.
NIP. 197704182011011007

Penguji IV


Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP. 199502232020122025


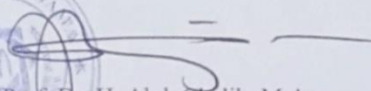
Surabaya, 13 Maret 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ARIF ADHIMUDDIN
NIM : 191219090
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : arifadhimuddin2000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

DARI NORMALISASI HINGGA SANKSI POLITIK: MAENA
POLITIK UANG BAGI PEMILIH BURUH DI PEMILU
LEGISLATIF TINGKAT LOKAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Maret 2024

Penulis

(M. Arif Adhimuddin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sikap apatisme publik mengenai politik uang ketika pemilu merupakan implikasi dari kegagalan elit dalam fundamental demokrasi. Narasi tersebut mengkonfirmasi argumen yang telah dikonstruksikan oleh Burhanuddin Muhtadi menyoal normalisasi politik uang. Dalam dasawarsa terakhir terjadi luapan artikel akademik dan non-akademik mengenai politik uang, tetapi tidak banyak yang spesifik membahas tentang makna politik uang bagi pemilih buruh. Penelitian ini menyediakan jawaban empiris atas pemaknaan politik uang bagi pemilih buruh di wilayah Desa Keboharan yang termasuk dalam DAPIL 4 Kabupaten Sidoarjo.

Dengan menggunakan metode riset kualitatif yang bersifat individual dan observasional. Aplikasi metode tersebut menjadi pijakan roda penelitian dan menghasilkan temuan yang konsisten dengan pertanyaan langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa politik uang tidak hanya menjadi normal baru dalam pemilu kita, tetapi lebih ekstrim dari itu politik uang dimaknai sanksi politik, yaitu sebagai momen pembalasan bagi sebagian kalangan pemilih untuk melampiaskan hasrat pribadi mereka atas ketidakpercayaan dan penyelewengan elit penguasa sebelumnya. Sumber data didapatkan melalui dua bagian, yakni data primer dengan cara terjun wawancara informan dan observasi, kemudian data sekunder dengan dokumentasi sebagai data pendukung penelitian.

Studi ini juga menjadi penegasan bahwa sistem proporsional terbuka turut berkontribusi atas maraknya politik uang sebab *personal votes* menjadi tuntutan utama persaingan internal bagi kandidat sesama partai untuk bisa lolos proses elektoral. Oleh karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya membutuhkan segelintir suara untuk mengalahkan lawan separtainya. Politik uang merupakan mekanisme tahap akhir seorang caleg dalam rangka meyakinkan dan memberikan nilai lebih di mata pemilih daripada pesaing internal.

Kata kunci : *pemilih buruh, makna politik uang, dan normal baru*

ABSTRACT

The public's apathy regarding money politics during elections is an implication of the elite's failure in the fundamentals of democracy. This narrative confirms the argument that has been constructed by Burhanuddin Muhtadi regarding the normalization of money politics. In the last decade there has been an outpouring of academic and non-academic articles on money politics, but not many specifically discuss the meaning of money politics for labor voters. This research provides empirical answers to the meaning of money politics for labor voters in the Keboharan Village area which is included in DAPIL 4, Sidoarjo Regency.

By using qualitative research methods that are individual and observational. The application of this method becomes the wheel of research and produces findings that are consistent with direct questions, so it can be concluded that money politics has not only become the new normal in our elections, but more extreme than that, money politics is interpreted as a moment of revenge for some voters to vent their personal desires. them for the distrust and abuse of the previous ruling elite. Data sources were obtained in two parts, namely primary data by conducting informant interviews and observations, then secondary data with documentation as research supporting data.

This study also confirms that the open proportional system has contributed to the rise of money politics because personal votes are the main demand for internal competition for candidates from fellow parties to be able to pass the electoral process. Because the seats obtained by parties are given to the candidate with the most votes, they only need a handful of votes to defeat their party opponents. Money politics is a final stage mechanism for a legislative candidate to convince and provide more value in the eyes of voters than internal competitors.

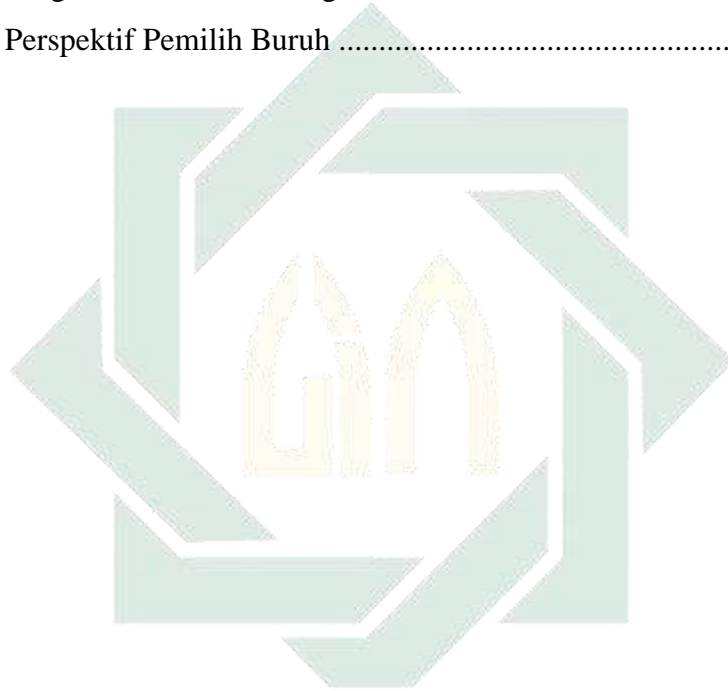
Keywords: labor voters, the meaning of money politics, and the new normal

DAFTAR ISI

Judul Skripsi.....	
Pernyataan Pertanggungjawaban Penulisan Skripsi	i
Persetujuan Dosen Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Dosen Penguji	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Motto Skripsi.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	22
A. Perspektif Teoritis	22
1. <i>Social Exchange Theory</i>	22
2. Konseptualisasi Politik Uang Dalam Pemilu	24
3. Makna Politik Uang	26
a) Politik Uang Sebagai Normalisasi Suap Politik.....	26
b) Politik Uang Sebagai Makna Marketplace.....	29
c) Politik Uang Sebagai Sanksi Politik	32
B. Argumentasi Utama	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel I : Informan Penelitian	41
Tabel II : Makna Diri Pemilih Buruh.....	66
Tabel III : Pengetahuan Politik Uang Pemilih Buruh	71
Tabel IV : Perspektif Pemilih Buruh	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Luas Wilayah Desa Keboharan	48
Gambar II	: Batas Wilayah Desa Keboharan	49
Gambar III	: Jumlah Penduduk Desa Keboharan.....	50
Gambar IV	: Profesi Warga Desa Keboharan.....	50
Gambar V	: Jumlah Pemilih Desa Keboharan	51
Gambar VI	: Jumlah Pemilih Kabupaten Sidoarjo.....	52
Gambar VII	: Foto Plano TPS 02 Desa Keboharan	87
Gambar VIII	: Foto Plano TPS 05 Desa Keboharan.....	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Savira, Sitta. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Cisseng Kabupaten Bogor Tahun 2013*. (Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta 2016
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati dalam *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*. Penerbit PolGov, Yogyakarta : 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2024.
(<https://sidoarjab.bps.go.id/statistable/2024/10/10/119/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-industri-sedang-menurut-kecamatan-2024>)
- Corstange, D. *Vote Trafficking in Lebanon*. International Journal Middle East Studies (2012)
- Damsar, Wilfrid. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2010)
- Diamond, L. *Elections without Democracy: Thinking about Hybride Regimes*. (2002) Journal of Democracy, 13(2): 21-35
- Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods in Social Research*. Mc Graw Hill, New York. 2002
- Fahmi, Ibrahim dan Abdullah Dahlan. *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta (2010) : ICW
- Hasan, Efendi. *Praktik Money Politics pada Pilkada di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017*. Vol. 4, No. 3 Tahun 2019
- Hasutiti dkk. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkringan dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*. Semarang (2012) : Universitas Diponegoro
- Huntington, S. *The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century*. Norman : University of Oklahoma Press (1991)
- Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung (2008) : PT. Remaja Rosdakarya
- Jensen, PS dan MK Justesen *Proverty and Vote Buying : Survey Based Evidence from Africa*. Electoral Studies, 33: 220-232 (2014)

